

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, karena itulah maka peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sadono Sukirno, 2015: 9). Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan terus meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal serta teknologi yang digunakan berkembang.

Simon Kuznets (dalam Arsyad, 2010: 277) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada

kemampuan disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai dari masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Arsyad mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

- 1) Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (human resources).
- 2) Pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kemajuan teknologi.
- 4) Sumber daya institusi (sistem kelembagaan).

2.1.1.2 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh para ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith yang menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill juga membahas masalah perkembangan ekonomi (Sukirno, 2006).

2.1.1.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik (dalam Sadono, 2015: 433) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar.

Malthus mengutarakan bahwa kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang diperlukan untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa diikuti dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Maka dari itu, menurut Malthus diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus.

2.1.1.2.2 Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori neo klasik merupakan perkembangan teori mengenai pertumbuhan ekonomi berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Dalam analisis neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat

kemajuan teknologi, sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Thevor Swan.

Dalam teorinya, Solow-Swan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (*technological progress*). Dalam persamaan yang dicantumkan oleh Sadono (2010: 437), yaitu:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

dimana,

ΔY : tingkat pertumbuhan ekonomi.

ΔK : tingkat pertumbuhan modal.

ΔL : tingkat pertumbuhan penduduk.

ΔT : tingkat perkembangan teknologi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solow (1956), ia menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Dari temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mencapai 2,75 persen per tahun pada periode 1909 sampai 1949, lebih dari setengahnya (1,5 persen) merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi, sedangkan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah penggunaan faktor produksi (Arsyad, 2010: 88).

Sementara itu, Harrod-Domar menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Peneliti dengan menggunakan pendekatan *actual*

growth rate (GN) dan *warranted rate of growth* (GW). *Actual growth rate* yang artinya laju pertumbuhan terjamin atau pertumbuhan aktual yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian, sedangkan *warranted rate of growth* yang artinya laju pertumbuhan alamiah yang oleh Harrod dianggap sebagai “optimum kesejahteraan” yang dapat juga disebut sebagai pertumbuhan potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh. Dalam pengertian ini GN dan GW yaitu untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan menghitung PDRB terhadap harga yang berlaku sebagai GN dan harga konstan sebagai GW. Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang.

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan dan kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Selanjutnya, Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha, merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan

mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru (Sadono, 2015: 434).

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah/daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Sebelumnya dalam perhitungan pendapatan daerah dibuat dalam bentuk harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu daerah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar daerah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Ketentuan ini sangat penting diperhatikan dalam ekonomi daerah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan atau suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan. Dalam kondisi seperti ini, sulit dikatakan daerah itu bertumbuh.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional

Dalam metadata yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Menurut badan pusat statistik produk domestik regional bruto adalah ukuran moneter nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan pada periode waktu tertentu. PDRB nominal bisa menggambarkan ekonomi suatu wilayah dan bisa dibandingkan secara nasional di pasar internasional.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan PDB/PDRB sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai kotor yang ditambahkan dari semua unit penduduk dan institusi yang terlibat dalam produksi dan jasa (ditambah pajak dan dikurangi subsidi). Dengan demikian PDB/PDRB adalah alat untuk mengukur nilai moneter akhir barang dan jasa yang dibeli oleh pengguna akhir dan diproduksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga yang berlaku. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun dasar. Pengertian PDRB dapat pula dipersempit menjadi PDRB menurut lapangan usaha

dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu dan pada periode tertentu. Sedangkan PDRB menurut penggunaan adalah jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir (Pradnyana, 2012).

Komponen-komponen penggunaan PDRB meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran Lembaga swasta yang tidak mencari untung, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap PDRB, perubahan stok dan ekspor neto (Pradnyana, 2012).

2.1.2.2 Perhitungan PDRB

PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional (Nasution, 2010).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Menurut Tarigan dalam Savira et al. (2022), produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tersebut. PDRB menurut harga berlaku

digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Oktafia et al., 2018). PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Dalam metadata yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, perhitungan produk domestik regional bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semua ini sebelum adanya potongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Untuk menghitung produk domestik regional bruto dapat menggunakan penghitungan pendapatan nasional yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{PDRB = C + I + G + (x - m)}$$

Keterangan:

C = pengeluaran konsumsi rumah tangga

I = pembentukan modal

G = pengeluaran pemerintah

(x – m) = selisih nilai ekspor dan impor

2.1.2.3 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

Menurut badan pusat statistik data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah sebagai berikut.

- 1) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
- 3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- 4) PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.
- 5) Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.

- 6) PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri serta luar wilayah.
- 7) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 8) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

2.1.3 Keuangan Daerah

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.1.3.1 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dalam negeri yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Wulantari & Haviz, 2021). Maksud dan fungsi DAU adalah untuk menyeimbangkan kinerja keuangan daerah dengan menerapkan

formula yang memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah (Wardani & Muchtolifah, 2022).

Jumlah keseluruhan DAU yang ditetapkan dalam APBN sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Penentuan proporsi ini belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan Pendidikan (Rahmah & Zein, 2016). Mekanisme perhitungan DAU di dalam pertimbangan otonomi daerah dilakukan pertama kali oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah (DPOD). Selanjutnya DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formulasi dan perhitungan DAU tersebut kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya, kemudian Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan perhitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD, lalu Menteri Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU tersebut sebagai bahan penyusunan RAPBN (Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005).

2.1.4 Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno, 2015: 121). Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Investasi pada hakekatnya merupakan suatu awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang diharapkan dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa tujuan dalam penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan.

2.1.4.1 Teori Investasi

1. Teori Klasik

Teori klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja (Arsyad, 2010: 88-99).

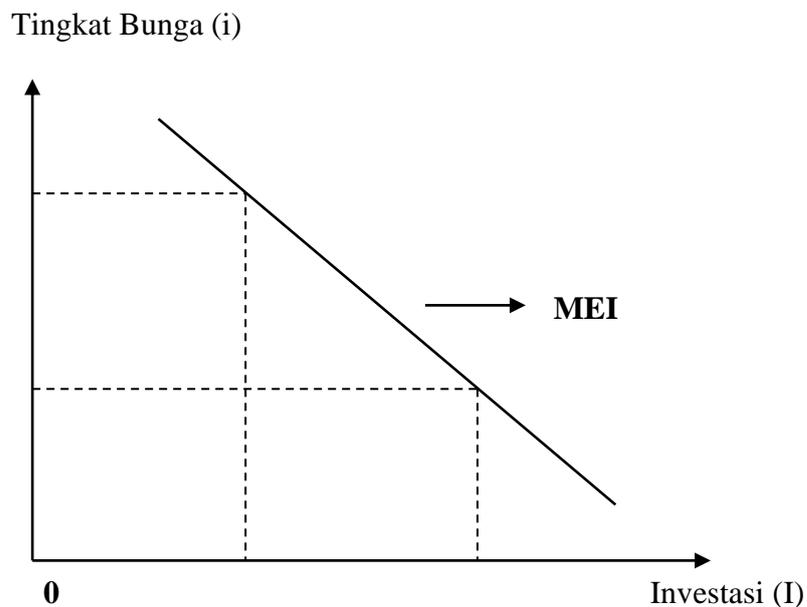
2. Teori John Maynard Keynes

Menurut pandangan Keynes, Marginal Efficiency of Investment (MEI) digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi. Dengan melihat konsep pemikiran tersebut maka investasi akan dilaksanakan apabila MEI lebih tinggi dari tingkat bunga.

Secara grafis MEI digambarkan sebagai suatu skedul turun atau negatif, menurunnya tingkat skedul MEI diakibatkan oleh dua hal, antara lain yaitu:

- 1) Semakin tinggi jumlah investasi dalam masyarakat, maka semakin rendah MEI.
- 2) Semakin tinggi jumlah investasi, maka ongkos dan barang modal (asset) akan semakin tinggi.

Berikut merupakan skedul MEI pada Gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*
Sumber: Priyono & Chandra, Esensi Ekonomi Makro (2016)

Menurut teori Keynes, faktor efisiensi marginal dari investasi merupakan kriteria utama untuk melaksanakan investasi. Efisiensi marginal ini tergantung pada perkiraan dan perhitungan pengusaha terhadap perkembangan situasi ekonomi masa depan. Akibatnya, tingkat MEI yang sebenarnya tidak dapat ditentukan dengan pasti.

2.1.4.2 Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak dan tidak bergerak) yang dapat disisihkan atau disediakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan (Setyowati, Eni dan Fatimah NH, 2013).

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dahulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu:

- a. Undang-undang ini dengan “Modal Dalam Negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
- b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan “Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak

langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Menurut UU No. 25 tahun 2007 terdapat beberapa tujuan penyelenggaraan modal diantaranya yaitu untuk:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional

2.1.4.3 Penanaman Modal Asing

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Peranan investasi terhadap kapasitas produksi memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi, investasi ini nantinya akan memperbesar pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara *multiplier effect*. Faktor produksi akan mengalami penyusutan, sehingga akan mengurangi produktivitas dari faktor-faktor produksi tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas harus

diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi tersebut (Novianto & Atmanti, 2013).

Menurut Salim dan Budi dalam Rizky et al. (2016) penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan modal asing maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Arsyad (2010: 229) manfaat investasi asing atau penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang, antara lain:

- a. Untuk menciptakan lapangan kerja;
- b. Proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat;
- c. Sumber tabungan atau devisa;

Dengan adanya penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, selain itu dengan adanya investasi asing akan mendapatkan keterampilan baru bagi negara sedang berkembang. Penanaman modal asing juga merupakan sumber tabungan karena dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ardiani Maulidia Oktafia, Aris Soelistyo, dan Zainal Arifin, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah positif dan signifikan.	Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol 2, Jilid 1, Hal 53- 62.
2.	Zuwesty Eka Putri, 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), Inflasi, dan Covid-19	DAU tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.	Jurnal Bisnis dan Manajemen . Vol 5, No. 2.

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Nurlaili Tito Wardani. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Hubungan dan pengaruh PMDN terhadap PDRB adalah positif dan tidak signifikan. Hubungan dan pengaruh PMA terhadap PDRB adalah negatif dan tidak signifikan.	Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE). Volume 7, Nomor 1.
4.	Trias Fajar Novianto, Hastarini Dwi Atmanti, 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2011.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Dana Alokasi Umum (DAU), Investasi, Angkatan Kerja, dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh PMA terhadap PDRB adalah positif dan signifikan.	Diponegoro Journal of Economics. Volume 2, Nomor 2, Hal 1-9
5.	Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Suputra, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah negatif dan tidak signifikan.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 18 No.3 Hal 1745-1773

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Hanani Aprilia Adi, Syahlina, 2020. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Dana Alokasi Umum (DAU), dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB adalah positif dan signifikan.	Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 10, No 1.
7.	Bambang Muqsyithu Wihda, Dwisetia Poerwono, 2014. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Dana Alokasi Umum (DAU), dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh PMA terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Hubungan dan pengaruh PMDN terhadap PDRB adalah positif dan tidak signifikan.	Diponegoro Journal of Economics Volume 3 Nomor 1 Halaman 9
8.	Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin dan Imam Mukhlis, 2016. Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Dana Alokasi Umum (DAU), dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB adalah positif dan signifikan.	JESP-Vol. 8, No. 1

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Tangkas Dwi Prakoso, Riyanto, dan Antono Herry Purnomo Adhi, 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah positif dan signifikan.	Seminar Nasional Keindonesiaan IV. FPIPSKR Universitas PGRI Semarang.
10.	Nur Mustar Muzi dan Fitri Arianti, 2013. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah 1990-2010.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Dana Alokasi Umum (DAU), dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB adalah positif dan signifikan.	Diponegoro Journal of Economics. Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-9
11.	Rahmah AR dan Drs. Basri Zein M.Si, Ak, CPA, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Dana Bagi Hasil, dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah positif dan signifikan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol 1, No. 1, al 213-220

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Rani Walantari dan Meidy Haviz, 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Covid-19	Hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Hubungan dan pengaruh PMDN terhadap PDRB adalah positif dan tidak signifikan.	Journal Riset Ilmu Ekonomi. Vol 1, No. 1, Hal 8-14.
14.	Anita Widiastuti, Silfiana, 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa.	Covid-19	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA).	Hubungan dan pengaruh Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif.	Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 11, No 1

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Suci Yanti Agustina, Syamsul Hadi, 2021. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Penanaman Modal Asing (PMA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja, dan Covid-19.	Hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Hubungan dan pengaruh PMDN terhadap PDRB adalah negatif dan tidak signifikan.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol 5, No 4.
15.	Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.	Covid-19	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA).	Hubungan dan pengaruh Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif.	Journal of Economics and Business, Vol 4, No 2.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, provinsi Jawa Barat menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya.

2.3.1 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi fiskal telah menjadi sebuah Rjukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih baik. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi DAU suatu provinsi, maka akan semakin tinggi belanja daerah di wilayah tersebut yang mengakibatkan perputaran produktivitas barang maupun jasa yang meningkatkan PDRB di wilayah tersebut.

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani Maulidia Oktafia, Aris Soelistyo, dan Zainal Arifin (2018) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini serupa dengan penelitian yang dihasilkan oleh Suci Yanti Agustina dan Syamsul Hadi (2021) yang menyatakan bahwa DAU memiliki hubungan yang positif dengan PDRB.

2.3.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal yang mengumpulkan akumulasi modal dengan membangun gedung dan peralatan yang berguna untuk kegiatan produktif, sehingga potensi output suatu negara akan meningkat dan tumbuh dalam jangka panjang. Besarnya tingkat investasi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik regional bruto (PDRB). Penanaman modal dalam negeri dapat digunakan pemerintah untuk pengembangan modal yang nantinya dapat direalisasikan ke dalam berbagai proyek sebagai penunjang kegiatan pembangunan didalam suatu wilayah tertentu. Didalam teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar, peran pembentukan modal disini sangat penting untuk menumbuhkan suatu perekonomian. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran mampu untuk menambah potensi suatu perekonomian dalam menghasilkan beberapa barang dan dapat pula dianggap sebagai pengeluaran yang mampu menambah permintaan yang efektif bagi seluruh masyarakat. Inti dari teori Harrod-Domar ini yaitu, di dalam perekonomian suatu negara dapat menyisihkan pendapatan nasionalnya untuk mengganti beberapa barang modal

yang telah rusak menjadi baru. Oleh karena itu untuk meningkatkan perekonomian suatu negara perlu adanya investasi baru. (Todaro, 2016 dalam Adi & Syahlina, 2020).

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanani Aprilia Adi dan Syahlina (2020) yang menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif terhadap PDRB. Penelitian yang sama dilakukan oleh Rani Walantari dan Meidy Haviz (2021) yang menyatakan bahwa PMDN dan PDRB memiliki hubungan yang positif.

2.3.3 Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Investasi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab, investasi bagi suatu negara merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian agar suatu negara dapat mendorong pertumbuhan ekonominya yang sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Penanaman modal asing (PMA) secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap suatu perekonomian. Nilai investasi yang tinggi akan memberikan dampak positif dalam perekonomian suatu negara. Peningkatan PMA akan meningkatkan modal perekonomian dalam suatu wilayah sehingga akan meningkatkan proses produksi barang maupun jasa dalam prosesnya. Tujuan lain dari penanaman modal adalah untuk mewujudkan alat-alat produksi yang nantinya akan mendorong kegiatan produksi di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan PDRB itu sendiri.

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Mustar Muzi dan Fitri Arianti (2013) yang menyatakan bahwa PMA memiliki hubungan

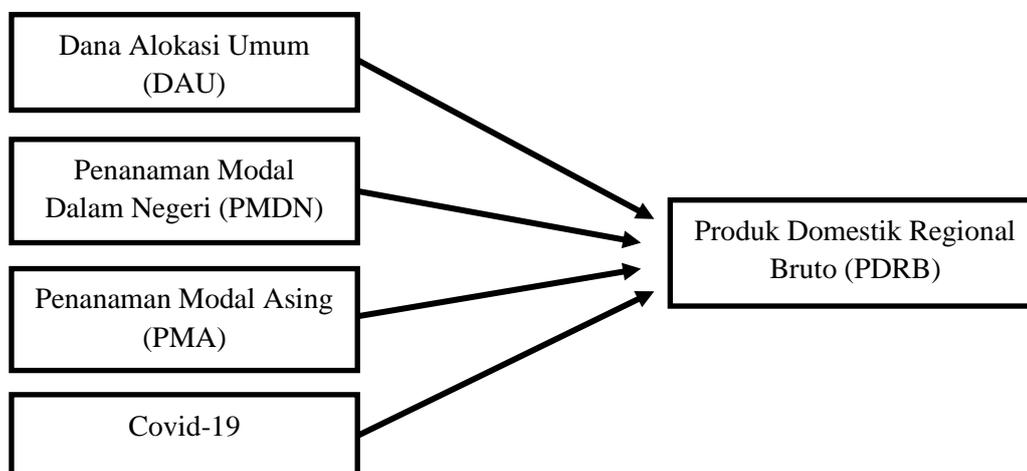
yang positif dengan PDRB. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bambang Muqsyithu Wihda dan Dwisetia Poerwono (2014) yang menyatakan bahwa PMA berpengaruh positif terhadap PDRB.

2.3.4 Hubungan Covid-19 Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia, hampir semua sektor terdampak oleh Covid-19 tak terkecuali pada sektor ekonomi. PDRB menjadi salah satu bagian yang terdampak di bidang ekonomi. Menurut badan pusat statistic (BPS) Jawa Barat, pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan permintaan akan barang dan jasa yang menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini disebabkan oleh tertahannya belanja dari populasi menengah dan atas, turunya daya beli masyarakat karena hilangnya pekerjaan, serta potensi kenaikan harga karena terganggunya sisi penawaran.

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Widiastuti dan Silfiana (2021) yang menyatakan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif terhadap PDRB. Penelitian yang sama dilakukan oleh Fakhrol Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri (2020) yang menyatakan bahwa Covid-19 memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara.

Dari uraian permasalahan yang ada dan berdasar studi literatur yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diduga dana alokasi umum, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing berpengaruh positif sedangkan Covid-19 berpengaruh negatif secara parsial terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2022.

2. Diduga dana alokasi umum, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan Covid-19 secara bersama-sama berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2022.